

Daftar Pustaka

Buku

- Askin, Moh., dan Masidin. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Prenada Media, 2023.
- H Idham, . Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam. Penerbit Alumni, 2022.
- H. Idham. Konstitusionalisme Tanah Hak Milik di Atas Tanah Hak Pengelolaan. Penerbit Alumni, 2021.
- Haris, Oheo Kaimuddin, dan M.S. Cendekia. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Hildawati, H., dkk. Sistem Administrasi Negara: Teori dan Praktik. PT Green Pustaka Indonesia, 2024.
- I Made Arya Utama. Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan. TBO, tanpa tahun.
- Matitaputty, Merlien Irene, dkk. Hukum Administrasi Negara. Penerbit Widina, 2024.
- Meytha Nurdeanti, S.H., dan P. Adab. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penerbit Adab, tanpa tahun.
- Polin, F.M. Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara. Media Nusa Creative, 2021.
- Radisman Saragih. Sengketa Kepegawaian dan Badan Peradilannya. Divya Media Pustaka, 2024.
- Siti Aminah, M.A. Teori Politik Sosial. Prenada Media, 2024.
- Solehoddin. Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023.
- Sri Nurnaningsih Rachman. Hukum Administrasi Negara. Madani Kreatif Publisher, 2025.
- Suadi, A. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sumardjono, Maria S. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Penerbit Buku Kompas, 2008.

Jurnal/Artikel

Apriyanto, Nova, dan Ufran Ufran. "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 447–452.

Dinda, Cut Mutia, dan A.L. Sentot Sudarwanto. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jasa Penilai Publik Pada Proyek Pembebasan Tanah." *Prosiding* (2022): 112–134.

Hastarini, Arvita. "Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022).

Leonardo, Ari. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Sakato Law Journal* 3, no. 1 (2025): 229–240.

Rejekiningsih, Triana. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 298–325.

Rongiyati, Sulasi. "Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Negara Hukum* 3, no. 1 (2016): 1–19.

Sidabukke, Sudiman. "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor." *Jurnal Yustika* 10, no. 1 (2007): 1–20.

Subekti, Rahayu. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 376–394.

Zulkarnain, Hadi. "Hospitals as Public Legal Subjects within the State Administrative Law Regime: Rumah Sakit Sebagai Subjek Hukum Publik Dalam Rezim Administrasi Negara." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 7, no. 1 (2026): 137–156.

Internet

Hikam, Herdi Alif Al. "Dana Pengadaan Lahan PSN 2022 Capai Rp 6,2 Triliun, Tertinggi Jalan Tol." *Liputan6.com*, 2022.

Laksono, Muhdany Yusuf. "Begini Cara Pemerintah Tentukan Nilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah." *Kompas.com*, 2023.

Rizki, Mochammad Januar. "Melihat Dampak UU Cipta Kerja terhadap Pengadaan Tanah Proyek Infrastruktur." *Hukumonline*, 2021.

Tria Sutrisna dan Ardhito Ramadhan. "Banyak Kasus Sengketa Tanah, Komisi II Usul Bentuk UU Pertanahan dan Reforma Agraria." *Kompas.com*, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

